

## ABSTRAK

### **Implementasi Penganggaran Partisipatif Dan *Refocusing* Anggaran Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022**

Oleh  
Imam Fatkuroji

Pengelolaan keuangan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif berpotensi meningkatkan tata kelola dan menghasilkan kepercayaan serta meningkatkan otoritas warga. Namun, idealitas penganggaran partisipatif dihadapkan pada situasi krisis ketika terjadi *Covid-19* yang membutuhkan kecepatan kebijakan fiskal yaitu *refocusing* anggaran. Pada satu sisi, partisipasi publik dalam penganggaran tetap harus dilakukan secara berjenjang, namun pada saat yang sama kondisi krisis menuntut kecepatan perubahan prioritas pengalokasian anggaran. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis proses implementasi prinsip-prinsip penganggaran partisipatif dalam *refocusing* anggaran berdasarkan perspektif Boulding and Wampler (2010) yang meliputi partisipasi warga aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, dan transparansi atau pengawasan; (2) menganalisis implikasi dari kebijakan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah berdasarkan aspek responsivitas, efisiensi, akuntabilitas, ketidakpastian dan kebingungan pemangku kepentingan serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat; serta (3) menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi *refocusing* anggaran pada aspek keterlibatan masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah, keterbatasan waktu dan sumberdaya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, penggunaan teknologi informasi serta sikap dan persepsi masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian prinsip-prinsip partisipatif dalam proses *refocusing* anggaran ketika terjadi kondisi krisis. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Temuan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat *refocusing* anggaran merasakan tanggungjawab dan tekanan yang berat, prioritas dan pilihan yang sulit dalam mengambil keputusan, dan pentingnya koordinasi antar sektor serta komunikasi dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *refocusing* anggaran tetap dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif apabila didukung oleh penguatan komunikasi publik, fleksibilitas regulasi teknis, dan desain ruang partisipatif yang adaptif dan inklusif terutama bagi kelompok rentan, (2) *refocusing* anggaran berimplikasi menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan warga untuk menghindari disinformasi dan fragmentasi sosial-politik, (3) tantangan terbesar pelaksanaan penganggaran partisipatif dalam *refocusing* anggaran adalah keterbatasan sistem partisipasi digital, rendahnya literasi fiskal, dan resistensi birokrasi. Perlu disusun regulasi teknis penganggaran partisipatif berbasis krisis, penguatan literasi fiskal, pengembangan platform digital, dan melembagakan kolaborasi lintas sektor, serta penyelarasan instrumen evaluasi kinerja daerah dengan prinsip partisipasi dan adaptabilitas guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Penganggaran Partisipatif, *Refocusing* Anggaran, Kebijakan Keuangan Daerah

## ABSTRACT

### **Implementation of Participatory Budgeting and *Refocusing* of the Budget and Its Implications for Public Policy in Central Lampung Regency 2020-2022**

By

Imam Fatkuroji

Public financial management that prioritizes participatory budgeting principles has the potential to improve governance, generate trust, and enhance citizen authority. However, the ideal of participatory budgeting is challenged by crisis situations. *Covid-19* which requires speed of fiscal policy, namely *refocusing* budget. On the one hand, public participation in budgeting must continue to be carried out in stages, but at the same time, the crisis conditions demand rapid changes in budget allocation priorities. The objectives of this study are (1) to analyze the process implementation of participatory budgeting principles in *refocusing* budget based on the perspective of Boulding and Wampler (2010) which includes active citizen participation, increasing citizen authority, social justice, and transparency or oversight; (2) analyzing the implications of policy *refocusing* budget on regional financial policies based on aspects of responsiveness, efficiency, accountability, uncertainty and confusion of stakeholders and relations between government and society; and (3) analyzing the challenges faced in implementation *refocusing* budget on aspects of community involvement, lack of government support, limited time and resources, distrust of the government, use of information technology and community attitudes and perceptions. The novelty of this research lies in the integration of participatory principles in the process *refocusing* budget during a crisis. The research method used was qualitative with an explanatory case study approach. The research findings were in the Central Lampung Regency Government at that time. *refocusing* The budget feels a heavy responsibility and pressure, difficult priorities and choices in decision making, and the importance of inter-sectoral coordination as well as communication and transparency. The results of the study show that (1) *refocusing* The budget can still implement the principles of participatory budgeting if it is supported by strengthening public communication, flexibility of technical regulations, and adaptive and inclusive participatory space design, especially for vulnerable groups, (2) *refocusing* The budget has implications for creating public distrust and confusion, so citizen involvement is needed to avoid disinformation and socio-political fragmentation, (3) the biggest challenge in implementing participatory budgeting in *refocusing* Budget constraints include limitations in digital participation systems, low fiscal literacy, and bureaucratic resistance. Technical regulations for crisis-based participatory budgeting, strengthening fiscal literacy, developing digital platforms, institutionalizing cross-sector collaboration, and aligning regional performance evaluation instruments with the principles of participation and adaptability are needed to strengthen adaptive, inclusive, and sustainable regional financial governance.

**Keywords:** Participatory Budgeting, Budget *Refocusing*, Policy, Regional Financial Policy